

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.<sup>2</sup> Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana. Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

<sup>2</sup> R Soeroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.27.

<sup>3</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul, (2007), *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 4.

Terdapat beberapa pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Hukum pidana materil yaitu hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi.
- b. Hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materil.

Dalam hukum pidana, apabila seseorang melanggar salah satu ketentuan dalam hukum pidana maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik itu penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan satu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-

---

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

syarat tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada si pembuat delik.<sup>6</sup>

Di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Menurut P.A.F. Lamintang terdapat 3 (tiga) tujuan pemidanaan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, hlm. 8.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 81.

<sup>7</sup> P. A. F. Lamintang, (1984), *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 23.

- b. Menimbulkan efek jera bagi pelaku,
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang harus ditaati dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.<sup>8</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>9</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

---

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang, (1996), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 16.



waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>10</sup>

Tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup yaitu, Tindak pidana umum dan Tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya sedangkan Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP, atau hanya mengatur delik-delik tertentu saja.<sup>11</sup> Tindak pidana khusus tersebut terdiri dari beberapa perbuatan, salah satunya adalah Tindak pidana kepemilikan Senjata Api Ilegal.

Kejahatan menggunakan senjata api telah banyak terjadi dan sangat mengancam ketentraman seseorang. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan senjata api ini terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan adanya rasa takut dan tidak nyaman dalam aktifitas sehari-hari. Untuk menanggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktu, dan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api. Terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa senjata api adalah hak miliknya dalam menjaga perlindungan dirinya sendiri sehingga cenderung diabaikan. Namun, disisi lain senjata api ini mempunyai syarat dan prosedur yang mengatur dalam pemilikan yang wajib dipenuhi.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

<sup>11</sup> Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, hlm.26.

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Di Indonesia, angka tentang perdagangan senjata api baik legal maupun ilegal sulit diperoleh, meskipun peredarannya bisa dikatakan sangat tinggi di masyarakat sipil. Karena beberapa alasan kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat yang berwenang tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api ilegal sangat sulit sekali untuk dilacak.

Penggunaan senjata api pada awalnya diperuntukkan bagi TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Polri (Polisi Republik Indonesia). Penggunaan senjata api oleh Polisi merupakan bagian dari tugas perlindungan warga negara dari segi pendekatan hukum. Senjata digunakan dalam keadaan terpaksa yang mengancam keselamatan orang lain. Senjata api bersifat melumpuhkan bukan membunuh oleh karenanya senjata api Polisi bersifat tembak target dalam arti hanya diarahkan pada orang tertentu sebagai subjek hukum.

Penggunaan senjata api yang ada pada TNI diarahkan kepada musuh-musuh yang datang dari negara lain, yang esensinya adalah sebagai perimbangan kekuatan untuk pertahanan. Sedangkan yang ada pada Polri diarahkan kedalam wilayah negara dimana sasarannya adalah warga negara sebagai subjek hukum, atau orang-orang lain yang bukan warga

negara Indonesia, tetapi berada di wilayah Indonesia secara sah dan karenanya wajib dilindungi oleh hukum Indonesia. Senjata yang diperuntukkan bagi Polri ini yang sejak semula dipersiapkan untuk penegakan hukum digunakan untuk keamanan, tetapi senjata api hanya digunakan untuk menghentikan perbuatan kekerasan yang mengancam jiwa warga negara, dan merupakan jalan terakhir, karena cara-cara Polisi yang lebih lunak tidak membawa hasil.<sup>12</sup>

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian senjata api adalah senjata yang menggunakan bubuk mesiu.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169, pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu

---

<sup>12</sup>James Daniel Sitorus, (2000), Makalah: *Teknologi Yang Dibutuhkan Dan dikuasai Dalam Angka Pengembangan Wawasan Hankamneg Penegakan Hukum Dan Kinerja TNI-Polri Dalam Membina Persatuan Dan Kesatuan*, Jakarta.

<sup>13</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/>, Senjata, Diakses pada tanggal 16 Juli 2019.

<sup>14</sup><https://kbbi.kata.web.id/senjata-api/>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2019

senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.<sup>15</sup>

Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *The Law on Firearms and Explosives* mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.<sup>16</sup>

Peredaran senjata api yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal maupun ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan. Contoh kasus penyalahgunaan senjata api ilegal yang marak terjadi adalah perampokan mini market dan pembegalan.

Baru-baru ini terjadi dua kasus penyalahgunaan senjata api, pada tanggal 14 juni 2019 terjadi aksi koboi yang dilakukan oleh pengemudi mobil BMW bernama Andy Wibowo (53) di Jakarta Pusat. Andy si koboi jalanan mengeluarkan senjata api kepada pengendara mobil lain. Saat itu dia yang melawan arah, yang diancam adalah pengendara tertib yang berjalan sesuai jalur. Kasus kedua terjadi sehari setelahnya di tempat yang berbeda, dua orang melakukan perampokan toko emas permata yang terletak di Kampung Cariu, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Tangerang, Banten. Mereka berhasil membawa kabur enam kilogram

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Ilegal.

<sup>16</sup> A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, (2015), *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 16.



emas senilai Rp 1,6 miliar. Para perampok menggunakan senjata tajam berupa kata dan sebuah pistol.<sup>17</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih mengangkat dua kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yaitu putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag. Dalam putusan 853/Pid.B/2017/PN Pdg pelaku bernama Andre Mardianto, ia dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena telah melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt./ 1951 yang berbunyi *“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”* Pelaku didakwa bersalah karena telah terbukti melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam;
- 1 (satu) buah amunisi berupa peluru bertuliskan pindad.

Pada putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag, pelaku bernama Retal Bin Soldi, ia dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 3

---

<sup>17</sup> <https://tirto.id/bukti-pengawasan-senpi-lemah-kasus-koboi-sopir-bmw-perampok-toko-ecwU>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019.

(tiga) tahun karena telah melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt./ 1951 dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 3 (tiga) buah senjata api rakitan jenis pistol revolver yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol revolver dengan silinder isi 6 (enam) warna silver bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol revolver dengan silinder isi 5 (lima) warna silver bergagang plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol revolver type patahan, warna silver bergagang kayu warna coklat.
- Berikut 12 (dua belas) butir peluru yang terdiri dari:
  - 10 (sepuluh) butir peluru amunisi kaliber 9 (sembilan)
  - 1 (satu) butir peluru amunisi kaliber 38
  - 1 (satu) butir peluru amunisi kaliber 5,56.

Dari kedua kasus di atas tampak suatu permasalahan yang menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada Undang-undang Nomor 12/Drt./ 1951 dijelaskan bahwa hukuman kepemilikan senjata api ilegal sangatlah berat berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, namun dalam kedua kasus tersebut hanya dijatuhi hukuman

penjara 2 (dua) tahun untuk kasus yang pertama dan 3 (tiga) tahun penjara untuk kasus yang kedua. Dalam kedua kasus tersebut juga dijatuhi hukuman yang berbeda sedangkan objek permasalahan dalam kedua kasus tersebut sama yaitu kepemilikan senjata api ilegal, ini juga menjadi pertanyaan menarik bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, juga karena keresahan dan kecemasan dari penulis pribadi terhadap kepemilikan senjata api secara ilegal ini, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag.?
2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag.
2. Untuk Mengetahui apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Dari Hakim Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia.
  - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta memberikan landasan untuk penelitian lebih



lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

## 2. Manfaat Praktis:

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau dasar relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Keadilan

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil, atau

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

terjadi keadilan korektif menurut Aristoteles.<sup>19</sup> Keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum menurut istilah John Rawls adalah “*reasonably expected to be everyone’s advantage*”.<sup>20</sup>

Berdasarkan teori keadilan dalam penerapan sanksi pidana kepemilikan senjata api ilegal yaitu keadilan sebagai suatu yang didambakan dalam hukum terutama ketika berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Mengingat yang dinyatakan dalam Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, pada sila Kedua menyebutkan “Kemajuan Yang Adil Dan Beradab” serta sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak masa Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan para ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori keadilan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: Teori dan Keadilan.<sup>21</sup>

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus dijalankan untuk kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah

---

<sup>19</sup> Arief Sidharta, Meuwissen, (2007), *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 93.

<sup>20</sup> John Rawls, (1971), *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 60.

<sup>21</sup> H. Salim, (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hlm. 25.

keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

- 1) Keadilan distributif (*justitia distributiva*)
- 2) Keadilan komutatis (*justitia commutativa*)
- 3) Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi seorang hakim. Keadilan Komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Sedangkan Keadilan Vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.<sup>22</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, mengemukakan pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen menganut aliran positifisme yang mengakui kebenaran dari hukum alam. Oleh karena itu pemikiran terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Hans Kelsen, Sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Darji Darmnodi Harjo dan Shidarta, (2006), *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 156-157.

<sup>23</sup> Hans Kelsen, (2011), *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 14.

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnnya tentang dunia ide, yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>24</sup>

#### b. Teori Pidanaan

Pemidanaan berasal dari “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan penghukuman kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 16.



hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan secara tradisional. Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam 2 kelompok teori, yaitu:

1) Teori Absolute

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>25</sup>

2) Teori Relatif

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana bukan dijatuhkan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatannya).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 10.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 16.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolute dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara sudut dan lainnya.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.<sup>28</sup> Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.<sup>29</sup>

Dalam tulisan ini, penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan antara lain:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, (2009), *Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 32.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 132.

a. Penerapan

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>30</sup> Dalam skripsi ini yang dimaksud adalah penerapan dari sanksi pidana dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal.

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>31</sup>

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>32</sup>

d. Senjata Api

Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> <https://kbbi.kata.web.id/?s=penerapan>, Diakses pada tanggal 23 juli 2019

<sup>31</sup> Marlina, (2011), *Hukum Penintiesier*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 19.

<sup>32</sup> Tongat, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm. 105.

<sup>33</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkngan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010, Berita Negara RI Tahunn 2010 Nomor 338.

e. Ilegal

Ilegal adalah tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.<sup>34</sup>

Dalam kasus ini membahas tentang senjata api ilegal, dimana kata ilegal disini dapat diartikan tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak yang berwenang memberikan izin kepemilikan senjata api.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam penelitian ini maka penulis memilih menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.<sup>35</sup>

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian *Yuridis Normatif* atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan

---

<sup>34</sup> <https://kbbi.kata.web.id/?s=ilegal>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2019

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT Kencana, hlm. 93.



penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.<sup>36</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>37</sup>

## 3. Jenis Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Burhan Ashofa, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rienka Cipta, hlm 13-14.

<sup>37</sup> <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019.

<sup>38</sup> Amirudin dan Zainal Askin, (2018), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>39</sup> Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum primer negara yang menganut sistem *common law* adalah putusan peradilan atau yurisprudensi.<sup>40</sup>

Namun hal tersebut tidak membatasi putusan dapat menjadi bahan hukum primer dalam suatu penelitian hukum di Indonesia. Putusan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag dan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 12.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 182

Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>41</sup> Contoh dari bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal, data dari internet yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>42</sup> Contoh bahan hukum tersier seperti kamus Indonesia, kamus Belanda, dan kamus hukum..

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*).


---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 52.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 52.

Studi dokumen atau kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dapat berdiri sendiri sehingga suatu penelitian dapat dilaksanakan hanya dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau studi kepustakaan.<sup>43</sup>

Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi:<sup>44</sup>

- 
- a. Undang-undang Dasar 1945;
  - b. Undang-undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Pemerintah;
  - f. Peraturan Menteri;
  - g. Peraturan Daerah;
  - h. Yurisprudensi;
  - i. dan lain-lain.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh

---

<sup>43</sup> Suteki dan Galang Taufani, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 216-217.

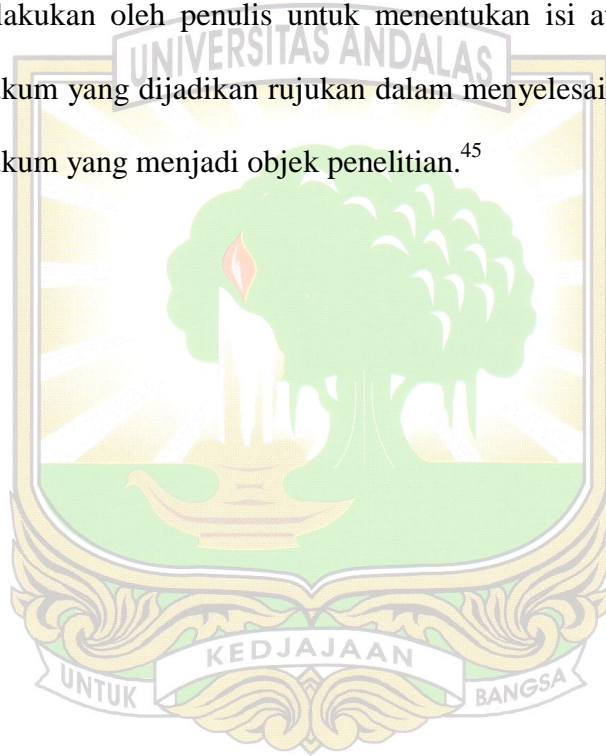
<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 217.



suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.